

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Kondisi kualitas sumber daya manusia merupakan kelemahan mendasar bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Pengalaman selama krisis ekonomi menunjukkan bahwa negara-negara yang mempunyai kualitas sumber daya manusia yang lebih baik akan lebih cepat bangkit dari krisis yang melandanya. Hal ini dapat dilihat pada negara-negara seperti Korea, Jepang, Thailand, dan negara-negara lainnya. Bahkan, Singapura tidak terkena krisis padahal negara-negara di sekitarnya mengalami krisis yang cukup parah. Jadi jelas, langsung atau tidak langsung, kualitas sumber daya manusia itu mempunyai peran yang paling utama dan sangat menentukan dalam pembangunan ekonomi. Indikator kualitas sumber daya manusia itu dapat berupa tingkat pendidikan dan tingkat kesehatan. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia untuk memacu pertumbuhan ekonominya diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas. Namun tingginya kualitas sumber daya manusia tidak dapat diukur dengan angka-angka semata, tetapi dapat dilihat dari apa yang dihasilkannya. Perlu diingat bahwa besarnya investasi yang dilakukan di sektor sumber daya manusia tidak akan membawa hasil yang baik bagi

... yang dihasilkannya. Perlu diingat bahwa besarnya investasi yang dilakukan di sektor sumber daya manusia tidak akan membawa hasil yang baik bagi

Sudah sewajarnya setiap pembangunan pada skala pusat maupun daerah berusaha menyeimbangkan pembangunan antar bidang, terlebih kedua bidang yaitu pembangunan ekonomi dan manusia. Karena pada akhirnya setiap pembangunan bidang apapun juga harus bermuara pada peningkatan mutu manusia. Untuk mengetahui sejauh mana keterkaitan pembangunan manusia dan pembangunan ekonomi khususnya pembangunan ekonomi di daerah di Indonesia maka penulis akan menggunakan indikator pembangunan ekonomi melalui PDRB dan PDRB per kapita sedangkan pembangunan manusia melalui IPM (Indeks Pembangunan Manusia).

PDRB dan PDRB/kapita selama ini dipercaya sebagai salah satu variabel utama yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan ekonomi. Tetapi kemudian beberapa tahun terakhir UNDP mengajukan indikator lain yang dianggap lebih baik guna mengukur keberhasilan pembangunan yaitu melalui IPM yang meliputi tiga indikator yaitu pendidikan, kesehatan, dan daya beli yang ketiganya merupakan indikator keberhasilan pembangunan manusia. Dengan mengaitkan indikator-indikator tersebut kiranya dapat dijawab pertanyaan pada pendahuluan paling tidak pada level propinsi.

Analisis silang sederhana dari data-data tersebut menunjukkan, 1. Bahwa suatu provinsi yang memberikan kontribusi besar kepada perekonomian nasional tidak selalu PDRB/kapitanya tertinggi. Demikian pula sebaliknya, provinsi yang memberikan kontribusi kecil dalam perekonomian nasional juga belum tentu

tidak selalu memperlihatkan IPM tertinggi pula. Sebaliknya semakin tinggi IPM tidak selalu semakin tinggi PDRB/kapita

Perkembangan ekonomi (PDRB) ini diukur baik secara absolut maupun secara relatif melalui produk domestik bruto dan pendapatan perkapita, PDB ini menunjukkan besaran keseluruhan out put atau produk dalam perekonomian suatu negara pada tahun tertentu. Sementara pendapatan perkapita menentukan kenaikan yang proporsional pada pengeluaran agregat (*agregat spending*). Dalam perhitungan dibedakan menjadi 11 lapangan usaha yaitu pertanian, kehutanan, perikanan, pertambangan, penggalian dan industri pengolahan : listrik, gas, air minum, bangunan, perdagangan, pengangkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan, sewa rumah, pemerintahan, dan jasa-jasa.

Yang kemudian dalam perhitungan PDB oleh BPS (Badan Pusat Statistik) 11 sektor mencakup 9 sektor utama yaitu : pertanian, pertambangan dan penggalian, industri pengolahan, listrik, gas, dan air, bangunan, perdagangan restoran dan hotel, angkutan dan komunikasi, bank dan lembaga keuangan serta jasa-jasa untuk masing-masing lapangan usaha dilakukan perhitungan PDB dengan menggunakan pendekatan produk atau pendekatan pendapatan (Wijaya, 1990 : 32)

Inti dari otonomi daerah pada akhirnya adalah persaingan ekonomi dan bisnis antar daerah di mana setiap daerah dituntut kreativitasnya dalam menciptakan pertumbuhannya masing-masing. Daerah yang kaya sumber daya

meskipun mungkin kurang stabil. Daerah yang kaya sumber daya manusia akan menjadi lokasi yang menarik bagi manufaktur atau jasa, terutama yang menggunakan teknologi tinggi. Dalam masa awal pelaksanaan otonomi atau dalam jangka pendek, diperkirakan daerah yang kaya sumber daya alam yang akan mengalami pertumbuhan cepat, dan baru dalam jangka menengah atau panjang, daerah-daerah yang tidak kaya SDA akan menyesuaikan diri dan mengambil manfaat dari adanya otonomi daerah.

Seperti lazimnya, tenaga kerja akan cenderung melakukan migrasi dari daerah ke daerah dengan kesempatan kerja besar dan upah tinggi. Hukum ini berlaku di kebanyakan negara maju, sehingga di sana lazim ditemui seorang yang lahir, sekolah, bekerja, pensiun, dan meninggal di kota yang berbeda-beda. Dengan otonomi daerah dan makin mandirinya perekonomian daerah, kondisi tersebut lazimnya juga terjadi di Indonesia. Melihat gejala saat ini, ada tendensi ke arah tersebut di mana sudah banyak individu dan perusahaan mengincar peluang usaha di daerah-daerah kaya SDA. Sepintas ini merupakan hal yang wajar, akan tetapi perlu diingat suatu kendala sosial yang belum teratasi saat ini yaitu potensi konflik antara penduduk lokal dengan pendatang yang umumnya pencari kerja dan pedagang.

Dengan membandingkan kualitas pekerja antara daerah-daerah yang kaya sumber daya alam dengan daerah-daerah di Pulau Jawa dan beberapa di Sumatra dan Sulawesi, diperkirakan akan terjadi migrasi angkatan kerja dari Jawa, Bali, Sumatra Barat dan Sumatera Utara, serta Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan ke

memperhitungkan arus migrasi ini, maka sangat besar kemungkinannya perekonomian lokal akan dikuasai pendatang meskipun tidak salah dari segi ekonomi, tetapi bermasalah dari segi sosial. Berbagai kasus kerusuhan dan penjarahan di daerah banyak disebabkan oleh kecemburuan masyarakat lokal terhadap kaum pendatang.

Membatasi migrasi masuk ke suatu daerah jelas tidak sesuai dengan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Paling jauh mungkin bisa dikeluarkan peraturan daerah yang menyatakan bahwa seseorang tanpa pekerjaan tetap hanya bisa menetap di suatu daerah selama jangka waktu tertentu, dan lebih dari waktu tersebut orang tersebut harus kembali ke daerah asalnya. Cara yang paling tepat, dalam pengertian tidak menciptakan distorsi ekonomi terlalu besar dan bisa diterima secara politis, adalah dengan mengaitkan penyerapan tenaga kerja lokal dengan insentif fiskal dan non fiskal bagi calon investor. Sebagai contoh apabila perusahaan memakai 10% tenaga lokal dari total *skilled labour*-nya perusahaan tersebut mendapatkan kemudahan dalam pajak dan retribusi daerah atau mendapatkan kemudahan untuk memperpanjang izin usahanya ketika hampir habis. Insentif tersebut juga dapat diberikan untuk investor yang mau memberikan pelatihan keterampilan kerja kepada masyarakat lokal tanpa harus menjamin mereka diterima di perusahaan tersebut.

Pemerintah daerah sendiri tentunya juga bertanggung jawab agar angkatan kerjanya kompetitif di pasaran kerja, paling tidak ditingkat lokal, dengan memfasilitasi tersedianya pendidikan ketrampilan kerja dari tingkat sekolah

pendidikan pada umumnya menjadi prioritas utama pemanfaatan dan hasil SDA di daerah-daerah yang kaya sumber daya alam tetapi sekarang masih tertinggal. Hanya perlu diperhatikan suatu gejala yang sudah terjadi di beberapa tempat di Indonesia yaitu urbanisasi yang berlebihan dan akhirnya memberatkan daerah itu sendiri.

Pertumbuhan pengeluaran pemerintahan daerah untuk belanja barang akan menambah jumlah permintaan agrerat, sedangkan pengeluaran pemerintahan daerah untuk APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) berdampak positif terhadap produktivitas pekerja dan ini akan mempengaruhi langsung pendapatan dari sisi penawaran. Sedangkan pada APBD, melihat kenyataan bahwa pembangunan daerah terutama Kota Dumai Propinsi Riau masih dalam proses membangun maka pengeluaran APBD yang mencerminkan peranan pemerintahan daerah dalam mendukung pembangunan daerah merupakan komponen yang sangat penting. Pengeluaran APBD untuk membangun jalan raya, jembatan, irigasi waduk, gedung sekolah dan lain-lain akan terus bertambah mengikuti pertumbuhan penduduk dan peningkatan kebutuhan masyarakat setiap tahunnya.

Dari uraian diatas, kami tertarik ingin mengidentifikasi pengembangan

APBD dan belanja barang di Kabupaten Dumai berdasarkan data tahun 2000 - 2005

## B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan hal-hal yang diatas pada latar belakang masalah maka penelitian ini dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut :

1. Sektor apakah yang menjadi unggulan di Kota Dumai-Riau ?
2. Strategi apakah yang dapat dikembangkan di Kota Dumai-Riau ?

## C. TUJUAN PENELITIAN

Maksud dan tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui sektor yang menjadi unggulan Kota Dumai-Riau.
2. Mencari Strategi yang dapat dikembangkan di Kota Dumai-Riau.

## D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat yang ingin di capai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### a. Bagi Mahasiswa

- Mengetahui sektor-sektor yang menjadi unggulan dan strategi yang

- Dapat digunakan sebagai landasan penelitian di kemudian hari dalam upaya mensosialisasikan sektor-sektor unggulan dan strategi Kota Dumai di dalam akademis.

b. Bagi Pemerintah Daerah

- Hasil penelitian ini di harapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan sebagai bahan masukan dalam penentuan kebijakan Pemerintah Daerah terutama di bidang ekonomi.

c. Bagi Masyarakat

- Hasil penelitian ini di harapkan sebagai bahan informasi ke masyarakat